

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Volume 15, Nomor 3, November 2021
Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, menetapkan bahwa Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Penasihat : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM

Pengarah :
1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Ketua Dewan Redaksi (Editor) : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.

Anggota Dewan Redaksi (Section Editor) :
1. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
2. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
3. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
4. Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, S.S., M.Si.
5. Ahmad Jazuli,S.Ag., M.H.
6. Haryono, S.Sos., M.H.
7. Imam Lukito, S.T., M.H.
8. Ahsan Yunus, S.H., M.H.

Redaksi Pelaksana : Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris :
1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
2. Lindung Budi Mulyawan, S.H.

Penyunting Tata Bahasa dan Naskah (Copyeditor) :
1. Amirah Balqis, S.H.
2. Mira Sukmawati, S.I.P.
3. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P.

Teknologi Sistem Informasi :
1. Mochamad Arip, S.Kom.
2. Harysandy Permana, S.Kom.
3. Agus Priyatna, S.Kom.
4. Adi Octaviantara, A.Md.

Alamat Redaksi:

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954
balitbangkumham@gmail.com

HALAMAN KOSONG

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah menelaah naskah sehingga dapat diterbitkan.

1. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan., S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

3. Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

4. Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pancasila

5. Dr. Edy Santoso, S.H., M.H.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

6. Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

7. Dr. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A.
Politeknik Imigrasi

8. M. Ali Equatora, A.Ks., M.Si.
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

HALAMAN KOSONG

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN (*ARTICLES*)

1. Analisis Sistem Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online pada Kantor Imigrasi 347-360
   Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, Imam Lukito
2. Penanganan Pengungsi yang Bunuh Diri di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian 361-372
   Samuel Tunggul Jovano, Cornelius Agatha Gea
3. Strategi Pencegahan Penyelundupan Telepon Seluler di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul 373-394
   Miftah Fragusti Arrazi, Arisman
4. Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi DI Yogyakarta 395-414
   Deslaely Putranti, Dewi Analis Indriyani
5. Komitmen Agen Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan Zona Integritas Berkelanjutan 415-430
   Ahmad Jazuli
6. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 431-446
   Ahmad Sanusi
7. Penilaian Kompetensi dan Manajemen Talenta dalam Pengembangan Karier ASN 447-472
   Taufik H. Simatupang
8. Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dalam Upaya Penegakan Hukuman Displin di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 473-488
   Nizar Apriansyah

TINJAUAN HUKUM *(REVIEW)*

9. Tindak Pidana Perpajakan dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Keterangan Waris 489-508
   Vani Wirawan
10. Analisis Mekanisme Ganti Rugi Pengembalian Dana dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen 509-526
    Adis Nur Hayati, Antonio Rajoli Ginting

HALAMAN KOSONG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengubah cakrawala berpikir ummat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern. Keberadaan dan keberkalaan penerbitan JIKH yang telah melampaui 1 (satu) dekade sejak tebit pertama kali pada tahun 2007, menjadi suatu kebahagiaan dan tantangan tersendiri bagi seluruh tim pengelola.

Pada Volume 15 Nomor 3, November 2021 ini, redaksi memuat artikel sebanyak 10 tulisan. Dalam edisi ini dimuat hasil-hasil penelitian (*article*) dan tinjauan hukum (*review*) yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI secara khusus dan tinjauan/kajian hukum secara umum, yang terdiri dari: Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, Hak Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum dan Administrasi serta Pengembangan SDM dan Organisasi.

Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi oleh Dewan Redaksi dan melalui penelaahan serta penilaian secara ketat dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang diterima dapat dimuat pada JIKH. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitasnya tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan yang tidak hanya ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga dari kalangan peneliti dan akademisi Universitas dan praktisi yang memiliki ketertarikan dan peminatan pada *scope* dan *focus* JIKH.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di JIKH. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan hasil pemikiran melalui artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam Jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan JIKH di masa yang akan mendatang.

Selamat Membaca,

R E D A K S I

HALAMAN KOSONG

Volume 15, Nomor 3, November 2021
p-ISSN: 1978-2292 (print)
e-ISSN: 2579-7425 (online)

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

HALAMAN KOSONG

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, Imam Lukito

Analysis of the Online Passport Queue Application system at the Immigration Office

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 3, November 2021

The Online Passport Queue Application is an innovation downloaded on Android smartphones, IOS, or the Directorate General of Immigration website and implemented at all immigration offices in Indonesia. It aims to deliver an ease of service to those using passport services at the immigration office. This online-based system makes it easier for people to get a queue number according to the place, date and time they set themselves depending on the available quota. However, since first applied in 2016, there have been many complaints from both the public and immigration officials. The purpose of this research is to examine the optimization of online passport queuing services at the immigration office as a parameter of customer public service with the Technology Acceptance Model (TAM). This research method is a mixed-method, namely quantitative and qualitative. The results showed that 1,159 (50.7%) respondents declared "effective" whereas 1.1126 (49.3%) said that the Online Passport Queue Application was "ineffective". It means that there is a "thin disparity of result".

Keywords: *passport; application; public service; quality of service; immigration; customer satisfaction*

Samuel Tunggul Jovano, Cornelius Agatha Gea

Handling of Suicide Refugees in Indonesia Based on Immigration Law Perspective

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 3, November 2021

Refugees are individuals or groups who seek assistance in the form of protection and asylum from other countries, but many refugees commit suicide worldwide. Suicide committed by refugees also occurs in Indonesia. Several factors cause suicide cases by refugees in Indonesia, such as international political policies, the economic problem, the behaviour of community, and depression experienced by refugees. The research method used is qualitative with a normative approach and qualitative analysis methods. The result of this study is the handling of refugees who commit suicide is the same as the handling of refugees when they were first discovered because of an emergency. This paper concludes that preventive action is an important step in preventing refugees from committing suicide in Indonesia. The Immigration Office as one of the facilitators is expected to carry out routine supervision of refugees, both physically and psychologically. Suggestions for these problems are that RUDENIM should treat with human rights if the behaviour of refugees is not good, IOM can provide psychological counselling, UNCHR must accelerate the resettlement process, and several community institutions can play a role in providing assistance.

Keywords: *refugees; suicide; immigration*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Miftah Fragusti Arrazi, Arisman

Mobile Phone Smuggling Prevention Strategy in Class II B Bantul State Prison

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 3, November 2021

The replacement of visits with video calls during the Covid-19 pandemic led to an increase in the desire of prisoners and inmates in Rutan Class II B Bantul to have personal communication tools because the number of residences exceeded capacity, while the communication technology facilities provided were limited, so it was prone to mobile phone smuggling. The threats and weaknesses that exist in Rutan Class II B Bantul provide a gap in the occurrence of security and order disturbances, especially the smuggling of mobile phones. There needs to be a strategy to prevent and overcome the problem. This research aims to analyze alternative strategies in dealing with issues or problems related to countering mobile phone smuggling. Using a qualitative approach that is done as a form of information gathering related to the subject matter by using SWOT analysis methods (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) in the internal factor evaluation matrix or IFE and External Factor Evaluation or EFE that outlines the factors of opportunities, threats, strengths and weaknesses. The results obtained show Rutan Class II B Bantul is weak and facing major challenges or dilemmas, so it is necessary to prepare alternative strategies through SWOT matrix analysis that can clearly describe how the strategy can be used as a form of effort to prevent mobile phone smuggling through Mobile Phone Jammer users, and maximize opportunities and strengths.

Keywords: *prevention strategy; mobile phone smuggling; Detention Center; SWOT*

Deslaely Putranti, Dewi Analis Indriyani

Protection of Geographical Indication by Geographical Indication Protection Community (MPIG) Post-Certification in Yogyakarta

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 3, November 2021

Geographical Indication (GI) product has been claimed as a premium-grade product, which can increase income if it is well utilized and protected. However, not all GI-certified products show significant price increase after certification such as Salak Pondoh Sleman (SPS). The research method of this research is socio-legal research. The data collection method is the virtual interview, observation, and document study. The research shows that after GI certification, MPIG Salak Pondoh Sleman has not shown any increase, especially regarding the added value of salak selling. The most contributing factor is the lack of understanding about the GI by both the sellers and buyers. Therefore, buyers are not able to distinguish between GI and non-GI products. The ambiguous function and overlap between MPIG and the association as the "managing group" of GI Salak Pondoh Sleman also contribute to the poor management of GI Salak Pondoh Sleman. Another GI Product, Batik Tulis Nitik Yogyakarta (BTNY) has recorded a rise of more than 50% in their sales. During the pandemic, MPIG BTNY is still actively operating because of the strong unity and communication among MPIG members and other stakeholders as well as dissemination on the importance of GI and love towards local arts.

Keywords: *geographical indication intellectual property; MPIG; increase of income; post-certification*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ahmad Jazuli

Commitment Agent Of Change Ministry Of Law And Human Rights In Development Of Sustainable Integrity Zone

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 3, November 2021

Bureaucratic reform is one of the first steps to support government programs to organize a good, effective and efficient organizational system for the Ministry of Law and Human Rights, so that it can serve the community quickly, accurately, and professionally in realizing good governance and clean governance towards the Ministry of Law apparatus. and Human Rights that are clean and free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN), increased service excellence and increased capacity and performance accountability. The purpose of this study was to determine and analyze the commitment of change agents of the Ministry of Law and Human Rights in the development of a sustainable integrity zone and the supporting and inhibiting factors. With a descriptive-qualitative approach, this study illustrates that the Change Agent of the Ministry of Law and Human Rights has succeeded in implementing its role as stipulated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights on Guidelines for Development of Change Agents, although there are still differences in perceptions in the mechanism for determining change agents. The potential driving factors for the development of change agents are energetic young human resources, high commitment from leaders, incentives, and community support.

Keywords: *commitment; agent of change; development; zone of integrity*

Ahmad Sanusi

Competency Development Of Functional Positions In The Ministry Of Law And Human Rights Of The Republic Of Indonesia

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 3, November 2021

In order to improve public services, the Ministry of Law and Human Rights, in 2017 and 2018 opened recruitment of employees to fill the formation of Functional Positions. One of the functional positions development is to improve employee competence through training. The problem in this study is how the pattern of fostering functional positions within the Ministry of Law and Human Rights, and the obstacles to implementing the policy for fostering these functional positions. Meanwhile, the purpose of the research is to explain: The pattern of functional position development (in the Correctional Sector; Immigration; Legal Counsel; and Legal Analyst) within the Ministry of Law and Human Rights. What are the obstacles in the implementation of the policy for the development of these functional positions. Employee expectations choose a career path Functional position. This research was conducted using the mixed method method, which in addition to using a questionnaire sent via google links, also conducted interviews with resource persons and literature studies. The results of the research, the implementation of the development of Functional Positions by the Directorate General as a supervisor shows quite well, however, it is still necessary to improve the teaching materials according to the scope of duties and functions of the Functional Position by evaluating curriculum and module guidelines in order to adapt to the development of current demands and functions this.

Keywords: *development; competence; functional position*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Taufik H. Simatupang

Competency Assessment and Talent Management in ASN Career Development

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 3, November 2021

Reform of the government bureaucracy in the field of Human Resources is essentially how to manage the State Civil Apparatus in a measurable manner based on its competence. The problem to be answered in this study is how to use the results of the competency assessment and the importance of talent management, which aims to determine the extent to which the results of competency assessment and talent management have been utilized in employee career development so far. The study method uses a quantitative and qualitative approach, is descriptive, and is an evaluative study using secondary and primary data. The results of the study concluded that the Ministry of Law and Human Rights has not yet utilized the results of competency assessments in ASN career development and has not used the concept of talent management. Therefore, the Ministry of Law and Human Rights needs to immediately issue a Minister of Law and Human Rights concerning the use of the concept of talent management in ASN career development at the Ministry of Law and Human Rights which accommodates 4 indicators (qualification, competency assessment, performance assessment, and organizational needs).
Keywords: *competency assessment; talent management; solutions*

Nizar Apriansyah

Implementation Of Integrated Information Systems In The Effort For Enforcement Of Discipline Punishments In Ministry Of Law And Human Rights

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 3, November 2021

The Personnel Management information system at the Ministry of Law and Human Rights has not provided valid and actual data on disciplinary penalties, this has an impact on personnel policy making. So it is found that employees who are affected and or are still in the process of disciplinary punishment are transferred or promoted, employees who are still in the process of enforcing discipline are included in the training and education. This fact shows the problem of the disciplinary punishment information system that has not been integrated in the Ministry of Law and Human Rights. This study uses a qualitative approach, the data source comes from informants from the Head of the Personnel Subdivision and Personnel Analyst. The results of the study indicate that the cause of no valid and actual disciplinary penalty data at the Ministry of Law and Human Rights is because many media are used in the implementation of the disciplinary punishment process, so the input data is spread across different media. The results of the study suggest integrating media related to the disciplinary process at the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: *law enforcement; disciplinary punishment; information systems; system integration*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Vani Wirawan

Tax Crimes in the Making and Registration of Inheritance Certificates

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 3, November 2021

Juridically, a Certificate of Inheritance must be made only once in the process of inheriting the transfer of land rights, but if it is made and registered more than once, it can indicate an unlawful act, some land registration practices due to inheritance in Sleman Regency use more than one Certificate of Inheritance. Inheritance has already happened, this can affect local tax revenues, namely BPHTB inheritance. This study aims to identify and analyze the criminal aspects and threats in the preparation and registration of Inheritance Certificates of Original Indonesian Citizens in Sleman Regency in the manipulation of inheritance tax income, and how to enforce the law. This research is descriptive with the type of empirical juridical research. The results of the analysis of the criminal aspects in making and registering a Certificate of Inheritance include: (a) the making of a Certificate of Inheritance aims to create a right, namely the right to inherit; (b) making a Certificate of Inheritance used as a statement of inheritance law events that explain the relationship between heirs and heirs; (c) the use of Inheritance Certificates made and registered more than once can manipulate local tax revenues, resulting in losses; (d) there is an element of intentionally using a certificate of inheritance, so that it violates / is threatened with the provisions of Article 39 paragraph (1) letter d, i of the KUP Law, in conjunction with Article 36 paragraph (1), (2) Perbup Sleman Number 14 of 2010. Meanwhile the law enforcement , related agencies still have no control, or good evaluation, so that there is no law enforcement, or by providing preventive solutions in the form of system improvements and massive legal counseling.

Keywords: *crime; taxation; inheritance certificate*

Adis Nur Hayati, Antonio Rajoli Ginting

Analysis of the Compensation Mechanism in the form of Refunds in E-Commerce Transactions Viewed from the Consumer Protection Law

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 3, November 2021

The regulation of the mechanism for providing compensation for refunds in e-commerce transactions has not been technically regulated. Meanwhile, many marketplace business actors have set a refund policy that isn't given directly to the consumer's account, but in the form of digital marketplace balance. Therefore, this paper intends to examine the compensation mechanism for refunds in e-commerce transactions in terms of consumer protection law. The type of this research is normative juridical. The result of the study indicates that there are two possible refund mechanisms, namely refunds without the obligation to return goods and refunds with conditions for returning goods. Based on Indonesian consumer protection law, the mechanism is valid as long as it does not conflict with the laws and regulations. Furthermore, the result of the study also show that refunds in the form of digital balances are legal, but the issues are 1) the ease and time limit of returning consumer funds to the digital marketplace balance and 2) the ease and period of withdrawing the digital marketplace balance into the consumer's bank account. Therefore, the suggestion is to review Article 19 of the Consumer Protection Act and accommodate arrangements for refunds in digital balances in e-commerce transactions.

Keywords: *consumer protection; compensation; refund; digital balance*

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, Imam Lukito (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta)

Analisis Sistem Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online Pada Kantor Imigrasi

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 3, November 2021

Aplikasi Antrian Paspor Online merupakan inovasi yang dapat diunduh melalui smartphone Android, iOS atau website Ditjen Imigrasi dan diterapkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi mereka yang menggunakan layanan paspor di kantor imigrasi. Sistem antrian berbasis online ini memudahkan pemohon paspor untuk mendapatkan nomor antrian sesuai tempat, tanggal dan waktu yang mereka tentukan sendiri tergantung kuota yang tersedia. Namun, sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2016, masih banyak keluhan baik oleh masyarakat maupun petugas imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pelayanan antrian paspor online di kantor imigrasi sebagai parameter pelayanan publik pelanggan dengan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Metode penelitian ini adalah mixed-method yaitu kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2.285 responden menjawab efektif sebanyak 1.159 (50.7%) dan yang menjawab tidak efektif 1.1126 (49.3%). Hal ini berarti bahwa terdapat “diparitas hasil yang tipis”.

Kata kunci: paspor; aplikasi; pelayanan publik; kualitas pelayanan; keimigrasian; kepuasan pelanggan

Samuel Tunggul Jovano, Cornelius Agatha Gea (Politeknik Imigrasi, Depok)

Penanganan Pengungsi yang Bunuh Diri di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 3, November 2021

Pengungsi merupakan individu atau sekelompok orang yang mencari bantuan berupa perlindungan dan suaka dari negara lain, tetapi banyak pengungsi melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri yang dilakukan oleh pengungsi juga terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus bunuh diri oleh pengungsi di Indonesia seperti kebijakan politik internasional, masalah perekonomian, perilaku dari masyarakat sekitar, dan depresi yang dialami oleh pengungsi. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penanganan pengungsi yang bunuh diri sama dengan penanganan pengungsi saat ditemukan pertama kali karena keadaan darurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan preventif merupakan langkah penting dalam mencegah pengungsi yang melakukan tindakan bunuh diri di Indonesa. Pihak Imigrasi sebagai salah satu fasilitator yang diharapkan melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengungsi, baik pengawasan secara fisik maupun pengawasan secara psikis. Saran terhadap permasalahan tersebut adalah pihak RUDENIM menindak secara HAM apabila terdapat pengungsi berperilaku kurang baik, IOM dapat memberikan konseling kejiwaan, UNCHR harus mempercepat proses *resettlement*, dan beberapa lembaga masyarakat dapat berperan dalam memberikan bantuan.

Kata Kunci: pengungsi; bunuh diri; keimigrasian

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Miftah Fragusti Arrazi, Arisman (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok)

Strategi Pencegahan Penyelundupan Telepon Seluler di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 3, November 2021

Digantikannya kunjungan dengan *video call* pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya keinginan tahanan dan narapidana di Rutan Kelas II B Bantul untuk memiliki alat komunikasi pribadi karena jumlah hunian yang melebihi kapasitas, sedangkan fasilitas teknologi komunikasi yang diberikan terbatas, sehingga hal itu rawan terjadinya penyelundupan telepon seluler. Ancaman dan kelemahan yang ada pada Rutan Kelas II B Bantul memberikan celah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya penyelundupan telepon seluler. Perlu adanya strategi yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi alternatif dalam menghadapi isu atau permasalahan terkait penanggulangan penyelundupan telepon seluler. Menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan sebagai bentuk pengumpulan informasi terkait dengan pokok permasalahan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat)* pada matriks *Internal Factor Evaluation* atau IFE dan *Eksternal Factor Evaluation* atau EFE yang menguraikan faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang ada. Adapun hasil yang diperoleh menunjukkan Rutan Kelas II B Bantul dalam keadaan lemah dan menghadapi tantangan besar atau dilematis, sehingga perlu dilakukan penyusunan strategi alternatif melalui analisis matriks SWOT yang dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana strategi yang dapat digunakan sebagai bentuk usaha pencegahan penyelundupan telepon seluler melalui pengguna Mobile Phone Jammer, dan pemaksimalan peluang serta kekuatan.

Kata Kunci: strategi pencegahan; penyelundupan telepon seluler; rutan; SWOT

Deslaely Putranti, Dewi Analis Indriyani (Universitas Ahmad Dahlan, DI Yogyakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta)

Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi DI Yogyakarta

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 3, November 2021

Indikasi Geografis (IG) pada produk selama ini diklaim sebagai produk premium yang dapat meningkatkan pendapatan jika digunakan dan dilindungi dengan baik. Namun, tidak semua produk IG yang terdaftar mengalami kenaikan harga secara signifikan pasca sertifikasi seperti Salak Pondoh Sleman dan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara virtual, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah sertifikasi IG, MPIG Salak Pondoh Sleman sampai saat ini belum menunjukkan peningkatan, khususnya pada nilai tambah dari hasil produksi salak. Faktor yang sangat mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman terkait Indikasi Geografis, baik pedagang maupun konsumen. Masyarakat belum mampu membedakan antara salak yang sudah tersertifikasi IG maupun tidak tersertifikasi. Ketidakjelasan fungsi dan tumpang tindih antara MPIG dan asosiasi sebagai "*managing group*" pada IG Salak Pondoh Sleman membuat pengelolaan IG Salak Pondoh Sleman tidak maksimal. Sebaliknya, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta justru mengalami peningkatan hasil produksi hingga lebih dari 50%. Saat pandemi, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta tetap produktif karena kekompakan dan komunikasi yang baik antara MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan para *stakeholder* serta penanaman edukasi pentingnya IG dan kecintaan terhadap seni khas daerah tersebut.

Kata Kunci: indikasi geografis, kekayaan intelektual; MPIG; peningkatan pendapatan; pasca sertifikasi

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Ahmad Jazuli (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta)

Komitmen Agen Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan Zona Integritas Berkelanjutan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 3, November 2021

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis komitmen agen perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembangunan zona integritas berkelanjutan dan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menggambarkan bahwa Agen Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah berhasil mengimplementasikan perannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan walaupun masih ada perbedaan persepsi dalam mekanisme penetapan agen perubahan. Faktor pendorong potensial pembangunan agen perubahan adalah sumber daya manusia muda yang enerjik, komitmen tinggi para pimpinan, insentif, dan dukungan masyarakat.

Kata Kunci: komitmen; agen perubahan; pembangunan; zona integritas

Ahmad Sanusi (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta)

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 3, November 2021

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2017 dan 2018 membuka penerimaan pegawai untuk mengisi formasi Jabatan Fungsional. Pembinaan Jabatan fungsional salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kendala-kendala pelaksanaan kebijakan pembinaan jabatan fungsional tersebut. Sementara tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan: Pola Pembinaan jabatan fungsional (di Bidang Pemasyarakatan; Keimigrasian; Penyuluh Hukum; dan Analis Hukum) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan jabatan fungsional tersebut. Harapan pegawai memilih jalur karier Jabatan fungsional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *mixed method*, dimana selain menggunakan kuesioner yang dikirimkan melalui *links google*, juga melakukan wawancara dengan nasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian, pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional oleh Direktorat Jenderal sebagai pembina menunjukkan cukup baik, namun demikian masih perlu dilakukan peningkatan materi bahan ajar yang sesuai lingkup tugas dan fungsi Jabatan Fungsional tersebut dengan melakukan evaluasi pedoman kurikulum dan modul guna menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan tugas dan fungsi saat ini.

Kata kunci: pengembangan; kompetensi; jabatan fungsional

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Taufik H. Simatupang (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta)

Penilaian Kompetensi dan Manajemen Talenta dalam Pengembangan Karier ASN

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 3, November 2021

Reformasi birokrasi pemerintahan di bidang Sumber Daya Manusia pada hakikatnya adalah bagaimana melakukan manajemen Aparatur Sipil Negara secara terukur berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Permasalahan yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan pentingnya manajemen talenta, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan manajemen talenta dalam pengembangan karier pegawai selama ini. Metode kajian menggunakan pendekatan kauantitatif dan kualitatif, bersifat deskriptif analisis, bentuk kajian evaluatif dengan memanfaatkan data sekunder dan data primer. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Kemenkumham sampai saat ini belum memanfaatkan hasil penilaian kompetensi dalam pengembangan karier ASN dan belum menggunakan konsep manajemen talenta. Oleh karena itu Kemenkumham perlu segera menerbitkan Permenkumham tentang penggunaan konsep manajemen talenta dalam pengembangan karier ASN di Kemenkumham yang mengakomodir 4 indikator (kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi).

Kata kunci: penilaian kompetensi; manajemen talenta; solusi

Nizar Apriansyah (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta)

Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dalam Upaya Penegakan Hukuman Displin di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 3, November 2021

Sistem informasi Manajemen Kepegawaian di Kementerian Hukum dan HAM belum menyediakan data hukuman disiplin yang valid dan aktual, hal tersebut berimbas pada pengambilan kebijakan kepegawaian. Sehingga ditemukan pegawai yang terkena dan atau masih dalam proses hukuman disiplin di mutasi atau dipromosikan, pegawai yang masih dalam masa proses penegakan disiplin diikutkan dalam diklat-diklat penjejangan. Fakta ini menunjukkan kendala sistem informasi hukuman disiplin yang belum terintegrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data berasal dari informan dari Kepala Subbagian Kepegawaian dan Analis Kepegawaian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab tidak ada data hukuman disiplin yang valid dan aktual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena banyak media yang digunakan dalam pelaksanaan proses hukuman disiplin, sehingga data yang di input tersebar di media yang berbeda. Hasil penelitian menyarankan agar mengintegrasikan media yang terkait dengan proses hukuman disiplin di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: penegakan hukum; hukuman disiplin; sistem informasi; sistem integrasi

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Vani Wirawan (Universitas Jenderal Achmad Yani, DI Yogyakarta)

Tindak Pidana Perpajakan dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Keterangan Waris

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 3, November 2021

Secara yuridis Surat Keterangan Waris harus dibuat hanya satu kali dalam proses pewarisan peralihan hak atas tanah, namun apabila pembuatan dan pendaftarannya lebih dari satu kali bisa terindikasi suatu Perbuatan Melawan Hukum, beberapa praktik pendaftaran tanah karena pewarisan di Kabupaten Sleman yang menggunakan lebih satu kali Surat Keterangan Waris sudah pernah terjadi, ini bisa mempengaruhi pemasukan pajak daerah yakni BPHTB waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek pidana dan ancaman dalam penyiasatan pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Waris Warga Negara Indonesia Asli di Kabupaten Sleman dalam manipulasi pemasukan pajak waris, serta bagaimana penegakan hukumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari analisis aspek pidana dalam pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Waris diantaranya: (a) pembuatan Surat Keterangan Waris bertujuan menimbulkan sesuatu hak yaitu hak mewaris; (b) pembuatan Surat Keterangan Waris digunakan sebagai keterangan peristiwa hukum warisan yang menerangkan hubungan ahli waris dan pewaris; (c) penggunaan Surat Keterangan Waris dibuat dan didaftarkan lebih satu kali dapat memanipulasi pemasukan pajak daerah, sehingga mengakibatkan kerugian; (d) adanya unsur sengaja menggunakan surat keterangan waris, sehingga melanggar/diancam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d, i UU KUP, *juncto* Pasal 36 ayat (1), (2) Perbup Sleman Nomor 14 Tahun 2010. Sedangkan penegakan hukumnya, instansi-instansi terkait masih belum ada penertiban, ataupun evaluasi secara baik, sehingga belum adanya penegakan hukum, atau dengan pemberian solusi preventif berupa perbaikan sistem dan penyuluhan hukum secara masif.

Kata Kunci: tindak pidana; perpajakan; surat keterangan waris

Adis Nur Hayati, Antonio Rajoli Ginting (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta)

Analisis Mekanisme Ganti Rugi Pengembalian Dana dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 3, November 2021

Pengaturan mekanisme pemberian ganti kerugian pengembalian dana dalam transaksi *e-commerce* belum diatur secara teknis. Sementara itu, banyak pelaku usaha *marketplace* yang menetapkan kebijakan pengembalian dana yang tidak diberikan langsung ke rekening konsumen, tetapi dalam bentuk saldo digital *marketplace*. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud mengkaji mekanisme ganti rugi pengembalian dana dalam transaksi *e-commerce* ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Tipe penelitian dalam kajian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua mekanisme ganti rugi pengembalian dana yang mungkin terjadi, yaitu pengembalian dana tanpa kewajiban pengembalian barang dan pengembalian dana dengan syarat pengembalian barang. Berdasarkan hukum perlindungan konsumen Indonesia, mekanisme tersebut pada dasarnya sah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukan bahwa pengembalian dana dalam bentuk saldo digital sah untuk dilakukan, tetapi isu yang perlu diperhatikan adalah 1) kemudahan dan batasan jangka waktu pengembalian dana konsumen ke dalam saldo digital *marketplace* serta 2) kemudahan dan jangka waktu penarikan saldo digital *marketplace* ke dalam rekening bank konsumen. Saran yang disampaikan adalah agar meninjau ulang Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta mengakomodasi pengaturan ganti rugi pengembalian dana dalam bentuk saldo digital dalam transaksi *e-commerce*.

Kata Kunci: perlindungan konsumen; ganti rugi; pengembalian dana; saldo digital